

PERANAN NELAYAN SEBAGAI PENJAGA “BERANDA NEGARA” MERUPAKAN BENTUK NASIONALISME

Oleh: Romadi
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNNES
(romadi_unnes@yahoo.com)

ABSTRACT

This article tries to show that all social elements of Indonesian society have responsibility to manage, secure, and empower all potentials related to maritime country. It cannot be denied that the fishermen also has significant responsible in this matter. Many people traditionally describe fishermen as a community who always life in a poor condition. They are viewed as a social group without any strategic role in national life including in guarding the ocean territory. For this reason, this article tries to trace the role of the fishermen in guarding the state territory. Their role is very significant especially in the remote small islands against the negative intrusion of foreign elements. It shows that the fishermen have patriotic and nationalistic spirits.

Key Words: *fishermen, patriotism, nationalism, frontage area, ocean territory.*

I. PENDAHULUAN

Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah, serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju di dalam satu kesatuan bangsa dan negara serta cita-cita bersama untuk mencapai, memelihara, dan juga mengabadikan identitas, persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara yang bersangkutan.¹ Nasionalisme Indonesia bertujuan mencapai kemerdekaan dari kekuasaan penjajah asing. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan berbagai kelompok masyarakat lainnya mulai menggerakkan masyarakat Indonesia dengan nasionalisme untuk mengusir Belanda. Kemerdekaan Indonesia yang merupakan puncak dari gerakan nasionalisme berhasil diproklamkan pada 17 Agustus 1945. setelah kemerdekaan, pemahaman terhadap makna nasionalisme semakin mengalami perkembangan.

Wujud dari nasionalisme pun semakin beragam seiring perkembangan negara. Nasionalisme bukan hanya bermakna

sebagai reaksi terhadap kolonialisme, tetapi juga semangat memiliki bangsa dan negara ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, setiap kelompok masyarakat Indonesia harus mempunyai nasionalisme sesuai dengan konteks kehidupan masing-masing.

Hans Kohn mengatakan bahwa individu yang mempunyai pengabdian, kesetiaan, dan ikatan dengan tanah airnya berarti mempunyai nasionalisme. Lebih jelas dia berpendapat bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda.

Selanjutnya, Hans Kohn mengidentikkan nasionalisme sebagai gejala membentuk ikatan bangsa. Bangsa-bangsa adalah buah hasil tenaga hidup dalam sejarah, dan karena itu selalu bergelombang dan tak pernah beku. Bangsa-bangsa adalah golongan yang beraneka ragam dan tak

terumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa-bangsa itu memiliki faktor-faktor obyektif tertentu yang membuat mereka itu berbeda dari bangsa-bangsa lainnya, misalnya persamaan keturunan, bahasa, daerah, kesatuan politik, adat istiadat dan tradisi, atau perasaan agama. Akan tetapi teranglah bahwa tiada satupun diantara faktor-faktor ini bersifat hakiki untuk menentukan ada tidaknya atau untuk merumuskan bangsa itu,² seperti dikutip Benedict Anderson mengatakan bahwanasionalisme adalah *patologi sejarah* pembangunan modern, tak bisa dielakkan sama seperti *neurosis* dalam sesosok pribadi, lengkap dengan kemenduan asasi yang melekat padanya, dengan kemampuan yang sudah dari “*sononya*” untuk anjlok kegilaan, berakar pada dilema-dilema ketidakberdayaan yang disorongkan ke hadapan sebagian besar jagad ini (mirip dengan *infantilisme* bagi masyarakat-masyarakat) dan pada umumnya tak mungkin disembuhkan.³

Nasionalisme yang selalu dikotonasikan dengan bangsa justru dianggap berbahaya dalam perkembangan dunia modern karena akan mampu memecah belah masyarakat dalam kelompok-kelompok kecil. Hal ini seperti diuraikan oleh Hobsbawm bahwa akar bangsa berasal dari masalah bahasa dan ikatan-ikatan primordial lainnya.⁴

Dekan ikatan-ikatan yang kecil maka ada kecenderungan bahwa masyarakat akan terkotak-kotak dalam kelompok-kelompok kecil masyarakat dengan kesetiaan yang lebih sempit pula. Oleh karena itu di dunia modern cenderung banyak terbentuk negara baru yang mendasar pada ikatan-ikatan sempit, seperti terjadi di Afrika, Eropa, dan bekas Uni Soviet.

Pendapat lebih kompromistis tentang bangsa muncul dari Benedict Anderson, bahwa bangsa atau *nation* adalah komunitas-komunitas pilitis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Bangsa adalah sesuatu yang terbayang karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan

mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Namun di benak setiap orang yang menjadi anggota bangsa hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka.⁵

Dengan demikian, warga negara sebuah bangsa mempunyai kesetiaan terhadap bangsa yang diyakininya sebagai sesuatu yang bersifat nasionalisme. Hal ini terkait dengan pendapat Hans Kohn bahwa nasionalisme adalah kesetiaan bangsa, yang ternyata bangsa merupakan komunitas yang terbayang, menurut Anderson. Jadi sebuah pengakuan warga bangsa terhadap komunitas bangsanya dengan persamaan yang dibayangkan merupakan wujud dari nasionalisme.

Setiap kelompok masyarakat memiliki semangat nasionalisme yang tidak selalu sama. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyak hal, seperti profesi, pendidikan, serta lingkungan geografis, lalu problem kehidupan dan sebagainya. Salah satu kelompok yang juga mempunyai jiwa nasionalisme adalah nelayan. Nelayan mempunyai posisi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena Indonesia merupakan negara maritim. Bagaimana bentuk nasionalisme nelayan serta perannya dalam kehidupan negara? Hal inilah yang menarik untuk kita pelajari lebih lanjut.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara maritim karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Banyaknya pulau yang mencapai 17.000 lebih ternyata hanya meliputi luas 3/5 dari keseluruhan luas wilayah Indonesia saat ini. Ketidaksadaran bangsa Indonesia sebagai negara maritim, nampaknya telah diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Wilayah teritorial laut Hindia Belanda diatur berdasarkan *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939* (Ordonansi tentang Lingkar Laut dan Maritim) yang dimuat dalam Staatsblad 39 No. 442. menurut lembaran negara ini laut teritorial yang dimaksud adalah tiga mil keliling suatu pulau, jadi wilayah negara terdiri dari pulau demi pulau dengan laut teritorial yang lebarnya tiga mil sekeliling pulaunya.⁶

Ketentuan yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda dapat dipahami karena kolonialis dengan sengaja memisahkan daerah di nusantara dengan laut. Tetapi Kapal Hindia Belanda bebas bergerak dari satu pulau ke pulau lain. Secara politik Hindia Belanda adalah penguasa, sehingga "kapal negara" tidak memerlukan perijinan untuk singgah di pelabuhan. Sedangkan kapal milik pribumi mempunyai gerak yang terbatas, tidak setiap pelabuhan boleh disinggahi karena harus mempunyai persyaratan tertentu.

Sesudah merdeka, kesadaran bahwa nusantara sebagai suatu kesatuan tersirat dalam pembukaan UUD 1945. dalam alinea keempat "... melindungi segenap tumpah darah,..." menunjukkan bahwa tumpah darah para pendiri bangsa bukan hanya Jawa, tetapi juga bagian nusantara lain. Adanya perang kemerdekaan, menyebabkan semangat "satu tanah air" baru bisa dideklarasikan pada 13 Desember 1957 dalam bentuk Deklarasi Juanda.

Tanpa deklarasi tersebut maka keadaan sebelum 1957 masih akan berlanjut sampai sekarang. Wilayah RI masih terpecah belah oleh kantong-kantong laut bebas/laut internasional, dan setiap kita akan berlayar ke pulau lain harus diperiksa dulu karena akan meninggalkan wilayah teritorial RI, demikian juga bila datang dari pulau seberang sekali lagi harus diperiksa karena secara teknis baru datang dari luar negeri.⁷

Dengan deklarasi Juanda itulah kalim bahwa darat dan laut di nusantara sebagai wilayah Indonesia ditegaskan dan dinyatakan kepada dunia. Untuk menunjukkan bahwa Indonesia penguasa lautan, masih diperlukan jalan panjang. "Orang-orang laut" perlu dibangkitkan dan diberi peran. Orang-orang laut yang dimaksud adalah masyarakat yang kehidupannya selalu bersinggungan dengan laut, salah satunya nelayan.

II. METODE

Dalam penulisan artikel ini ada dua metode yang digunakan dalam penulisan

artikel ini. Pertama metode studi pustaka. Melalui studi pustaka diperoleh informasi mengenai buku dan referensi yang relevan dengan topik yang akan dibahas dalam artikel. Studi pustaka dilakukan di berbagai perpustakaan untuk mendapatkan bahan referensi dan buku-buku. Setelah ini buku dan bahan referensi yang dianggap relevan itu isinya dipelajari dan dianalisis, untuk mendapatkan bahan dan data bagi penulisan artikel ini. Dengan demikian pada tahap ini digunakan metode kedua yang dikenal sebagai *content analysis*. Melalui metode itu, berbagai buku dan referensi ditimbang dan dibandingkan.

III. PEMBAHASAN

3.1. Nelayan Penjaga Beranda Negara

"Bantalku Ombak Selimutku Angin", demikian salah satu kalimat dalam sajak "Di Bawah Layar" karya KH.D.Zamawi Imron. Menyimak kalimat tersebut jelas kita akan tertuju pada suatu kelompok masyarakat yang beraktifitas di laut seperti nelayan. Aris K. Pranoto menggolongkan masyarakat nelayan menjadi empat kelompok yaitu masyarakat nelayan tangkap,, masyarakat nelayan pengumpul/bakul, masyarakat nelayan buruh dan masyarakat nelayan tambak.⁸

Nelayan selama ini, sering digambarkan sebagai masyarakat yang terbelakang, miskin, tertindas, sulit diatur, penuh konflik, dan sebagainya.⁹ Namun demikian mereka mempunyai peran penting dalam kehidupan negara, bukan hanya sebagai pengumpul hasil laut melainkan sebagai penjaga dan pengawas pulau-pulau kecil dan terpencil. Pulau-pulau terpencil apalagi yang terletak di bagian luar wilayah Indonesia merupakan *beranda negara*.

Pulau-pulau terluar wilayah Indonesia akan dilalui untuk pertama kali oleh kapal-kapal asing yang akan memasuki wilayah Indonesia, baik kapal nelayan, dagang, militer, ataupun lainnya. Demikian juga ketika sebuah kapal akan meninggalkan

wilayah Indonesia, pulau-pulau terluarlah sebagai pintu terakhir yang harus dilalui.

Oleh karena itu, pulau-pulau kecil, terpencil dan terluar wilayah Indonesia mempunyai kedudukan penting dalam bidang politik, ekonomi, militer dan sebagainya. Pemerintah mempunyai keterbatasan untuk menjaga dan mengawasi wilayah tersebut, oleh karena itu peran nelayan tidak dapat diabaikan. Ini menjadi bukti bahwa nelayan mempunyai nasionalisme terhadap negara, baik disadari ataupun tidak.

Berkaitan dengan keberadaan nelayan sebagai penjaga *beranda negara*, tentu yang dimaksud adalah masyarakat nelayan tangkap. Mereka beraktifitas di laut menggunakan kapal untuk menangkap ikan. Semakin besar kapal yang digunakan semakin jauh jangkauannya dan membutuhkan waktu lama. Mereka mampu menjangkau daerah-daerah yang luas diluar laut pedalaman, bahkan di daerah *Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE)* yang berbatasan dengan negara-negara lain. Dalam kondisi demikian mereka mempunyai posisi penting karena dekat dengan pulau-pulau terpencil dan terluar Indonesia yang rawan terhadap gangguan kekuatan asing.

Dalam aktifitasnya nelayan-nelayan ini seringkali singgah bahkan menginap di pulau-pulau terpencil dan terluar Indonesia. Aktifitas singgah atau bahkan menginap mereka lakukan bukan hanya untuk istirahat, melainkan juga berlindung apabila ada badai atau gelombang tinggi. Bahkan nelayan membangun gubuk-gubuk kecil dan tempat bersandar perahu di pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Setiap saat gubuk-gubuk kecil tersebut disinggahi baik untuk sekedar melepas lelah maupun menginap beberapa hari. Disinilah peran nelayan secara tidak langsung dalam menjaga wilayah Indonesia dari aktifitas nelayan negara lain.

Indonesia merupakan negara dengan pulau lebih dari 17.000 buah. Dari jumlah tersebut 92 pulau berada di titik terluar Indonesia. Dari 92 pulau tersebut merupakan wilayah dari 19 propinsi dan

berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga.¹⁰

Pulau-pulau terluar merupakan beranda negara, karena merupakan garis terdepan wilayah negara Indonesia yang langsung berhadapan dengan negara tetangga. Kapal-kapal laut negara lain bila akan memasuki wilayah perairan Indonesia akan melalui salah satu titik dari pulau-pulau tersebut. Sebaliknya bila kapal-kapal Indonesia akan keluar negeri tentu akan keluar melalui salah satu titik dari pulau tersebut. Oleh sebab itu, tidak berlebihan apabila pulau kecil dan terpencil merupakan beranda negara.

Beberapa pulau terluar masih terdapat pulau-pulau yang disengketakan negara tetangga. Sengketa pulau dan konflik perbatasan laut muncul disebabkan Indonesia belum menerapkan *Marine cadaster*. *Marine cadaster* adalah penerapan prinsip-prinsip kadaster diwilayah laut yaitu mencatat batas-batas dan penggunaan (hak dan kepentingan atas) ruang laut oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah, perlindungan ruang laut, konservasi, taman nasional, taman suaka margasatwa, termasuk hak ulayat laut komunitas masyarakat hukum adat. *Marine cadaster*.

secara khusus merupakan sistem bagaimana suatu negara dapat mengadministrasikan sumber-sumber daya kelautan dalam konteks UNCLOS. Kacaunya administrasi wilayah pesisir dan lautan Indonesia tercermin dalam banyak hal: (1) kita mengklaim seluruh pulau besar dan kecil Indonesia berjumlah 17.504 pulau, namun sampai saat ini kita hanya mampu memberi nama berikut posisi geografisnya sebanyak 7.870 pulau yang memenuhi definisi pulau menurut pasal 121 UNCLOS 1982; (2) ada sebuah lembaga di Indonesia yang menggunakan citra satelit untuk menghitung jumlah pulau sehingga memperoleh pulau lebih banyak yaitu 20.000 pulau. Padahal yang dilihat citra satelit belum tentu pulau sesuai dengan definisi UNCLOS 1982, karena mungkin hanya berupa vegetasi mangrove yang ada di permukaan laut. Pengadministrasian wilayah pesisir dan

sumber daya kelautan dalam *Marine cadaster* tidak sebatas untuk *present* dan *future records*, namun juga data *historical records*.¹¹

Pulau yang belum diberi nama, posisi geografis belum jelas serta belum dilaporkan ke PBB berpotensi menimbulkan sengketa. Pulau-pulau tidak berpenghuni yang terletak di wilayah terluar Indonesia sangat terancam untuk diklaim negara lain. Siapakah yang harus memantau secara terus menerus keberadaan pulau-pulau tersebut?

TNI AL, terutama marinir sebagai alat pertahanan negara selama ini banyak ditempatkan di pulau-pulau terluar tanpa penghuni tetap. Mereka secara bergilir ditempatkan dan dipulangkan untuk menjaga pulau-pulau tersebut. Namun karena jumlah TNI AL sangat terbatas, maka sebagian pulau terpencil dibiarkan kosong tanpa penjaga.

Dalam hal ini keberadaan para nelayan menjadi sangat penting. Nelayan banyak memanfaatkan pulau-pulau terluar untuk sekedar singgah beristirahat baik sementara maupun menginap. Nelayanlah yang selalu menjaga dan mengetahui secara persis kondisi pulau-pulau kecil, baik yang terluar wilayah Indonesia maupun yang terletak di laut pedalaman. Secara tidak langsung, nelayan mempunyai peran untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah Indonesia.

Kita tentu masih ingat lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan yang di klaim Malaysia. Lepasnya kedua pulau tersebut bukan karena Indonesia kalah dalam bukti-bukti sejarah kepemilikan kedua pulau tersebut, melainkan karena alasan lain. Pada 17 Desember 2002 dengan perbandingan suara 16:1, Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia dalam sengketa pulau Sipadan dan Ligitan dengan alasan *continuous presence, effective occupation* dan *ecology preservation*.¹²

Dari kejadian ini menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat (nelayan) Indonesia saat itu tidak memperhatikan kedua pulau tersebut, sehingga dikelola oleh negara lain.

Sementara pemerintah dan nelayan Malaysia telah lama sirna dan mengelola kedua pulau tersebut. Relajar dari kasus Sipadan dan Ligitan itu, nelayan mempunyai posisi penting dalam menjaga dan mengelola pulau-pulau terluar Indonesia.

Selain kasus Sipadan dan Ligitan, yang perlu mendapat perhatian adalah perkembangan perluasan wilayah Singapura karena adanya aktifitas pengurukan laut (reklamasi). Pada awal kemerdekaan tahun 1965: 581 km², tahun 1990: 633 km², dan proyeksi tahun 2030 menjadi 733 km². Sebagian tanah/pasirnya berasal dari pulau-pulau di propinsi kepulauan Riau dan Provinsi ini merupakan hasil pembelian yang direstui pemerintah daerah sebagai manivestasi kewenangan daerah untuk meningkatkan PAD.¹³

Dalam kondisi ini maka batas teritorial laut Indonesia dengan Singapura dapat mengalami perubahan di masa-masa mendatang sehingga dapat memunculkan konflik baru. Bagaimana peran nelayan? Ketika ekspor pasir sudah dilarang pemerintah, ternyata penambang pasir secara ilegal masih terus dilakukan. Aparat keamanan seringkali kecolongan, karena para penambang bekerja sama dengan oknum aparat. Oleh karena itu, yang selalu mengetahui secara persis aktifitas penambang pasir ilegal adalah nelayan. Nelayanlah yang dapat memberikan informasi, Namunkarena lemahnya perlindungan terhadap keselamatan nelayan menyebabkan mereka tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kepada negara.

Keselamatan nelayan terancam oleh penambang pasir ilegal yang bekerjasama dengan oknum aparat keamanan dan pengusaha-pengusaha nakal. Para penambang dan oknum aparat tidak pernah berpikir masa depan bangsanya, melainkan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Dalam keadaan seperti ini mereka adalah orang-orang yang benar-benar menjual "tanah air".

Masyarakat pantai dan nelayan secara umum tidak memperoleh keuntungan materi. Satu ganti rugi yang pernah diberikan pemerintah berkaitandengan penambangan

pasir di Riau sebesar Rp. 500.000.- tiap nelayan hanya sekali. Dibandingkan dengan rusaknya lingkungan laut dan pulau Cecil, ganti rugi sebesar itu tidak ada artinya. Namur sekali lagi karena pembangunan terpusat di *birokrasi* dan *kapitalis* maka nelayan “harus” menerima, tanpa harus protes.

Penambangan pasir ternyata tidak hanya dilakukan di kepulauan Riau, karena di pulau-pulau kecil pedalaman pun seringkali pasir ditambang, menyebabkan pulau-pulau kecil tenggelam, seperti diceritakan di harian *Kompas*, terdapat tiga buah pulau di Kabupaten Sumenep yang hampir tenggelam, yaitu pulau Gresik Putih, pulau Gili Panjang, dan pulau Keramat. Pulau Gresik Putih sudah mulai tenggelam sejak tahun 2005, sedangkan dua pulau lain terancam tenggelam karena luasnya tinggal seperlima aslinya. Anehnya aparat keamanan dari resort Sumenep tidak mengetahui, yang mengetahui justru nelayan, yang selanjutnya dilaoporkan kepada LSM Pulau Raja.¹⁴

Peran nelayan lainnya terhadap negara adalah memberikan informasi adanya *illegal fishing*. Kerugian negara akibat penangkapan ikan oleh nelayan-nelayan asing secara ilegal mencapai lebih dari Rp. 40 trilyun tiap tahunnya. Walaupun ratusan kapal asing di tangkap, ribuan lainnya mencuri. Keterbatasan aparat dan fasilitas negara dalam menjaga laut yang sangat luas menyebabkan pencurian ikan marak terjadi. Namun dengan bantuan nelayan Indonesia dalam memberikan informasi kepada Polairud terdekat, beberapa kapal pencuri ikan berhasil ditangkap.

3.2. Nasionalisme Nelayan”yang Terbayang”

Untuk membicarakan wujud dari nasionalisme nelayan, tentu kita harus melihat unsur-unsur nasionalisme itu sendiri. Di antara unsur nasionalisme antara lain adalah identitas nasional, solidaritas, kemandirian dan kesadaran kolektif sebagai bangsa. Suatu tindakan yang mempunyai

kandungan nilai nasionalisme tidak harus memuat semua unsur nasionalisme, tetapi mengandung satu diantaranya pun dapat dikategorikan sebagai tindakan nasionalisme. Atau bahkan mengandung bagian kecil dari unsur nasionalisme sekalipun, masih dapat dikategorikan sebagai tindakan nasionalisme. Tentu saja berbagai tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, bahkan individu masyarakat Indonesia disesuaikan dengan permasalahan dan kondisi yang dihadapi mereka. Tiap kelompok masyarakat mempunyai ekspresi berbeda untuk mewujudkan rasa nasionalisme, tak terkecuali kelompok nelayan.

Kelompok Nelayan secara sepiintas dapat dianggap sekelompok masyarakat yang kehidupannya bebas, tanpa terikat oleh norma tertentu. Namun sesungguhnya banyak norma yang dipegang oleh kelompok mereka, baik yang bersifat lokal maupun *universal*. Norma lokal biasanya berupa kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ataupun dilarang sebelum, pada saat dan sesudah melaut. Kusumastanto, mengatakan bahwa nelayan mempunyai pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) dan tradisi lokal dalam pengelolaan perikanan. Misal *Sasi* di Maluku, *Ondoafi* di Papua, *Panglima Laut* di Aceh, *Kelong* di Riau dan *Tonaas* di Sulawesi Utara.¹⁵

Nelayan pantai Logending Kabupaten Kebumen misalnya, tidak akan melaut pada hari Jumat Kliwon. Hari itu diperuntukkan bagi aktivitas di darat berupa kegiatan sosial seperti kerja bakti, donor darah, dan sebagainya. Kebiasaan ini dikaitkan dengan adanya kepercayaan tentang penguasa alam gaib Nyai Roro Kidul.¹⁶

Di Sabang, nelayan sangat patuh kepada *panglima*, yaitu seorang ketua adat yang mengelola laut tertentu. Pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636), panglima adalah penguasa laut, tetapi sekarang bergeser menjadi pengelola wilayah laut.¹⁷ Dibawah *panglima laut* terdapat *keujrun kuala*, pejabat yang mengurus perahu-perahu pukat. Kecuali itu ada tenaga

teknis yaitu *pawang pukat* yang bersama *anak-anak pukat* turun ke laut menangkap ikan.¹⁸

Di sabang nelayan juga mempercayai tanda-tanda alam, misalnya melihat bintang yang disebut kelului. Bila nelayan melihat bintang tersebut menuju selatan, maka nelayan harus segera mengikutinya ke arah selatan. Hal ini merupakan pertanda di belakang bintang tersebut akan terjadi badai.¹⁹

Nelayan Mandar mempunyai kebiasaan yang "aneh". Dalam menangkap telur ikan terbang (*motangnga*) mereka mempunyai kebiasaan *pau-pau macca* (mengucapkan kata-kata porno). Tradisi yang sudah turun temurun ini dilakukan agar sang *maraqdia* (ikan terbang) yang mendengar *pau-pau macca* melakukan hal-hal seperti yang diucapkan oleh nelayan yaitu bersetubuh (reproduksi). Apa yang diucapkan nelayan merupakan sebuah simbol kesuburan yang tersirat.²⁰

Selain mempunyai nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan di laut, nelayan mempunyai nilai-nilai *universal* sebagai masyarakat bagian bangsa. Di Indonesia belum ada data resmi jumlah nelayan secara keseluruhan. Nelayan tiap daerah terorganisir dalam kelompok-kelompok sendiri, baik yang bersifat kelompok resmi, maupun perkumpulan. Kelompok resmi adalah mempunyai aturan-aturan keorganisasian dengan jelas. Namun tidak sedikit kelompok mereka berupa perkumpulan. Nelayan adalah perangkai pantai dan pemersatu pulau. Mobilitas nelayan lebih luas dibanding mobilitas masyarakat di darat. Nelayan dari satu daerah akan bekerja sampai wilayah laut daerah lain, bahkan hasil tangkapan juga dibongkar di tempat yang lain lagi.

Dalam berkomunikasi antar nelayan dari berbagai daerah digunakanlah bahasa Indonesia. Bagi nelayan bahasa Indonesia bukan sekedar bahasa negara, melainkan *lingua franca* bagi mereka. Penggunaan bahasa Indonesia bukan sekedar kewajiban, tetapi dilakukannya tanpa kesadaran lagi, otomatis. Ini menunjukkan bahwa nelayan

dan bahasa merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mereka adalah pemersatu bangsa, walaupun tanpa bumbu kata-kata nasionalisme. Bagi mereka nasionalisme adalah perbuatan nyata, yaitu sebuah gerakan sebagai realisasi dari semangat kebangsaan,²¹ sehingga komunikasi dan persatuan nelayan dari berbagai daerah terjalin baik. Bila ada di laut, biasanya akses dari permasalahan di darat, misal masalah otonomi daerah, pilkada, dan sebagainya. Nelayan menganggap bahwa laut milik bersama dan tidak bisa dipecah-pecah, seperti kata AB.Lapian "kita tidak boleh melupakan kearifan tradisional yang mengatakan bahwa "air tidak dapat dibelah-belah".²²

Nelayan juga pengikat hubungan antar daerah, terutama daerah pantai dan pulau-pulau. Nelayan Pantai Utara Jawa berhubungan dengan nelayan dari pantai Timur Sumatera, pantai selatan Kalimantan, Sulawesi dan pulau disekitarnya. Sedangkan nelayan dari Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Bali, NTT dan nelayan-nelayan besarhubungan mereka lebih luas, bahkan sampai keluar negeri. Wujud dari nasionalisme mereka adalah dipasangnya bendera merah putih di anjungan setiap kapal nelayan.

Dengan bendera merah putih, nelayan dari daerah lain dengan mudah mengenal bahwa mereka masih satu bangsa. Ditempat yang jauh dari daratan mereka akan merasa satu dengan ikatan merah putih. Artinya kesadaran mereka untuk memasang bendera merah putih tidak hanya dilandasi oleh peraturan yang mewajibkan, tetapi oleh ikatan persatuan sebagai suatu bangsa.

Dalam kondisi negatif sekalipun, misal tertangkap oleh negara lain, mereka akan mudah dikenal sebagai nelayan Indonesia. Nelayan ini tidak malu untuk mengakui bahwa mereka berasal dari Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa nelayan juga mempunyai jiwa nasionalisme. Dengan bendera merah putih dan pengakuan sebagai bangsa Indonesia, perlindungan negara terhadap mereka pun akan lebih mudah dilakukan. Negara lain yang

menangkap pun dengan mudah berkoordinasi dengan pemerintah.

Dalam keadaan yang lebih buruk, misalnya para pelaut yang disandera oleh pemberontak di negara lain, misal di Sri Lanka dan Somalia (Afrika Timur), di Filipina dan sebagainya, mereka akan mengakui bahwa Indonesia adalah negara mereka. Ketika mereka disandera, mungkin mereka bekerja pada kapal-kapal asing, tetapi dengan pengakuan sebagai warga negara Indonesia, mereka akan mendapat kemudahan, karena umumnya para pemberontak tidak mempunyai permasalahan dengan pemerintah Indonesia.

Melihat gejala ini menunjukkan bahwa nelayan telah hidup dalam dunia global, menembus batas daerah dan batas negara. Walaupun demikian mereka masih memegang identitas nasional, sebuah pengakuan sebagai bangsa Indonesia. Dalam kondisi ini, nasionalisme berfungsi menyeleksi dan menyaring pengaruh globalisasi yang mengancam eksistensi bangsa.²³

Walaupun nelayan sudah hidup dalam dunia global, tetapi identitas dan pengakuan sebagai bangsa Indonesia tetap dijunjung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok nelayan mempunyai nasionalisme, walaupun dalam wujud yang lain.

Menurut Taufik Abdullah, bahwa ketika negara sudah memasuki *fase baru*, waktu "penciptaan realitas baru" atau pembangunan yang bersifat menyeluruh telah baru dijalani pada saat batas domestik dan internasional telah semakin mengabur, maka nasionalisme pun harus mengalami *penyesuaian format politik*.

Dalam keterbatasan kemampuan mengatasi penambahan jumlah, jenis dan intensitas masalah yang dihadapi, maka argumen "kebudayaan" bisa ditampilkan sebagai *excuse* dan nasionalisme negara" menjadi landasan solidaritas baru, yang bercorak hegemonik.

Dalam pandangan Taufik Abdullah,²⁴ model nasionalisme dalam kondisi negara modern yang penuh dengan

pluralisme harus mengalami metamorfosis, sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan kelompok nelayan mengejawantahkan bentuk nasionalisme sesuai dengan pemahaman, karakter dan masalah yang dihadapi sehari-hari.

Namun hal yang perlu diperhatikan oleh negara, nelayan harus diberdayakan dan dibangun basis kekuatannya. Dengan langkah ini pemerintah harus memberikan porsi dan perhatian yang besar bagi pembangunan kelautan dan perikanan, yang sesuai dengan karakteristik masyarakat pesisir,²⁵ yaitu: pertama, sudut sosiologis-historis dan kultur yang mempengaruhinya. Masyarakat pesisir menunjukkan pola sikap dan hidup yang menganut

kosmopolitanisme/internasionalisme, dinamis, *enterpreneurship*, *outward looking*, dibandingkan dengan masyarakat pedalaman; kedua, secara geografis-ekonomis, pesisir dan laut memiliki karakter yang berbeda dari daratan dari segi sumberdaya, sehingga tingkat beresiko dalam berusaha tinggi (*high risk*), namun penerimaannya juga tinggi (*high return*);

Ketiga, terdapat doktrin yang berlaku dilaut bahwa laut adalah akses terbuka (*open acces*) atau sebagian milik bersama, sehingga tingkat persaingan dalam berusaha dan berkompetisi memperebutkan akses sumber daya di laut sangat ketat dan keras; keempat, sumber daya pesisir dan lautan sangat tergantung pada kondisi alam seperti cuaca dan lingkungan. Apabila pemberdayaan masyarakat nelayan sesuai dengan karakter masyarakat dan lingkungan, maka tuntutan kewajiban sebesar apapun dari negara, nelayan akan mampu melaksanakannya.

IV. SIMPULAN

Nasionalisme yang banyak dipahami selama ini adalah suatu tindakan sebagai reaksi terhadap kolonialisme. Ketika negara kebangsaan sudah terbentuk, nasionalisme dalam bentuk reaksi terhadap kolonialisme tidak diperlukan lagi. Nasionalisme harus

diwujudkan dalam bentuk lain, mengingat kolonialisme sekarang muncul dalam bentuk baru yang bermacam-macam, terkait dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya.

Pendapat Gellner seperti dikutip Riswandha Imawan, ia menyatakan bahwa nasionalisme tidak hanya bermakna gerakan, tetapi juga sentimen kenegaraan.²⁶ Maksudnya seorang yang masih mengakui dan mempunyai rasa setia kepada negara, walaupun kecil, berarti sudah mempunyai jiwa nasionalisme.

Nelayan merupakan satu kelompok masyarakat Indonesia yang mempunyai kekhususan. Mereka beraktifitas di lautan dengan resiko yang sangat berat. Perlindungan negara selama ini pun relatif kurang, apalagi perhatian dalam bentuk bantuan sarana prasarana sangatlah terbatas. Oleh karena itu nelayan Indonesia umumnya masih terbelenggu oleh kemiskinan. Walau demikian, mereka mempunyai jiwa nasionalisme terhadap bangsa dan negaranya. Itu yang patut dicontoh.

CATATAN

¹ *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. (Jakarta, Hoge Value: 1990). Hal. 31.

² Hans Kohn, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*. (Jakarta. PT Pembangunan dan Penerbit Erlangga, 1984) Hal. 11-12.

³ Anderson, Benedict. *Imagined Communities, Komunitas-Komunitas Terbayang*. (Yogyakarta. Insist Press dan Pustaka Pelajar:2002). Hal. 7.

⁴ Hobsbawm, E.J. *Nasionalisme Menjelang Abad XXI*. (Yogyakarta. PT. Tiara Wacana: 1992). Hal. 17-30.

⁵ Anderson, Benedict. *Imagined Communities, Komunitas-Komunitas Terbayang*. (Yogyakarta. Insist Press dan Pustaka Pelajar:2002). Hal. 8.

⁶ Lapian, AB. 2007. *Lima Puluh Tahun Wilayah RI*. (Makalah UNDIP Semarang, 2007). Hal.1

⁷ Imron, Zamawi, KH. D. *Di Bawah Layar*, Pusi dibacakan pada Seminar Internasional Dinamika

Kemaritiman Dalam Perspektif Sastra Dan Sejarah, di UNDIP Semarang 15 Desember 2007

⁸ Pranoto, K. Aris. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. (Jakarta, Dirjen KP3K). Hal. 27-35.

⁹ Mengenal kondisi nelayan digambarkan oleh Kusnadi dalam buku *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan* (LKIS, 2002) dan juga Budi Siswanto dalam buku *Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan* (Laksbang Mediatama, 2008).

¹⁰ Dalam *Bulletin KP3K Vol. XVII Desember 2007* hal. 26 dimuat 92 pulau terluar Indonesia lengkap dengan garis lintang dan bujur serta posisi perairannya, yang merupakan wilayah 19 propinsi. Pulau-pulau terluar tersebut berbatasan dengan 10 negara tetangga.

¹¹ *Kompas*. Blok Ambalat: Opini Publik Yang "Misleading". 11 April 2005. Hal 48

¹² Mas'ud, Mohtar. *Mencari Solusi Sengketa Ambalat*. (Semarang, FIS, 2005). Hal.1

¹³ Soemiarno, Slamet, Kol.Pur. *Ambalat Dan Konflik Kepentingan Indonesia Dan Malaysia*. (Semarang, FIS:2005) Hal.4

¹⁴ *Kompas*. 2007. *Pulau-Pulau Di Sumenep Terancam Tenggelam*. Berita tanggal 31 Desember. Hal. 22.

¹⁵ Kusumastanto, Tridoyo, *Ocean Policy Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah*. (Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003). Hal. 133

¹⁶ *Suara Merdeka*. *Tradisi Argopeni Ayah, Warga Donor Darah Tiap Jumat Kliwon*. (Semarang, Suara Merdeka 2006).Hal. 24.

¹⁷ Muhammad, Mahdi dkk. "*Panglima*" *Hukum Adat Laut Sabang*. (Jakarta, Kompas 2008) Hal.16.

¹⁸ Suroyo, Djuliaty, AM, dkk. 2007. *Sejarah Maritim Indonesia I*. (Semarang, Penerbit Jeda 2007). Hal. 304.

¹⁹ Mahdi Muhammad, *ibid*. hal. 16.

²⁰ Alimuddin, M. Ridwan. 2004. *mengapa Kita (Belum) Cinta Laut ?*. (Yogyakarta.Ombak: 2004). Hal.16.

²¹ Imawan, Riswanda. *Wawasan Kebangsaan : Indonesia di Tengah Badai Perubahan Politik*. (Semarang, Badiklat, 2005) Hal.2

²² Lopian dalam Sutejo K Widodo.*Ikan Layang Terbang Menjulung*. (Semarang, BP Universitas Diponegoro, 2005). Hal. XIII.

²³ Kartodirjo, Sartono. *Pembangunan Bangsa*. (Yogyakarta Aditya Media, 1994) Hal. 45.

²⁴ Abdullah, Taufik. *Nasionalisme dan Sejarah*. (Bandung. Satya Historika: 2001) Hal.40.

²⁵ Kusumastanto, Tridoyo, *Ocean Policy Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah*. (Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003). Hal.. 61-62

²⁶ Imawan, Riswanda.2005. *Wawasan Kebangsaan : Indonesia di Tengah Badai Perubahan Politik*.. (Semarang, Badiklat, 2005). Hal. 2.